



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 74 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR 74 Tahun 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN
 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	KELEMBAGAAN													
1	Peraturan Daerah tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/Instruksi Bupati/Surat Edaran Bupati	Peraturan/ kebijakan	-	1	-	-	-	-	Bappelitbanda	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembang
					-	1	-	-	-	-	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan Teknis	3	4	5	5	5	5	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bappelitbanda	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
					0	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	1. Perangkat Daerah; 2. Kecamatan; 3. Desa.	1. 1 2. 5 3.	1. 50 2. 39 3. 0	1. 40 2. 39 3. -	1. 40 2. 39 3. -	1. 40 2. 39 3.	1. 40 2. 39 3.	DinsosPPKBPPPA			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Penguatan indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	24	24	24	24	24	24	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	
		Fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah Desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Desa	80	100	150	200	250	351	DinsosPPKBPPPA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tentang Perlindungan Anak, Termasuk Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media Online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih perlindungan anak	Orang	-	-	39	39	39	39	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					-	-	-	-	-	1	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA	- SDM - Lembaga	20	20	20	20	20	20	DinsosPPKBPPPA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkerjasama, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)	Jumlah program/ Panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa Layak Anak	- Dokumen - Laporan	1	1	1	1	1	1	DPMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA media cetak yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	0	0	0	1	1	1	Dishubkominfo			
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA SDM organisasi keagamaan yang	SDM	-	3	3	3	3	3	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			mendapat penguatan pelebagaan PUHA											
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	9	9	9	9	9	9	Kemenag	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	
			lembaga keagamaan											
		Penguatan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapat Penguatan Pelebagaan PUHA	SDM	100	398	450	500	500	500	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Lembaga	5	5	5	5	5	5				
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	2	4	6	8	10	12	DinsosPPKBPPPA			
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	1	2	4	6	8	10	DinsosPPKBPPPA			
		Pembentukan tim pelaksana layanan Kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan Kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga	0	0	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
			tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial											
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN													
1	Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun	%	99	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	Disdukcapil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait pencatatan sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	%	86,40						Disdukcapil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan/ Desa yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	- Kecamatan - Desa	-39 -0	-39 -0	-39 -0	-39 -0	-39 -0	-39 -0	Disdukcapil	-	-	-
2	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	Penyebaran Informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)	0	12	12	12	12	12	Dishubkominfo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	Dishubkominfo			
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Kecamatan/Desa yang tersosialisasikan Hak Anak atas ILA	- Kecamatan - Desa	-39 -351	-39 -351	-39 -351	-39 -351	-39 -351	-39 -351	Dishubkominfo			
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten	52	52	52	52	52	52	Dishubkominfo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Media Informasi Publik
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	Perpustakaan Kabupaten / Kecamatan / Desa	8	2	2	2	2	2	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota
			Jumlah Lokasi Ekstensifikasi Layanan melalui Mobil Perpustakaan Keliling	Lokasi	36	10	10	10	10	10	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan			
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan		Pembudayaan Gemar Mem-baca Tingkat Kabupaten/ Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial
			Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak	%	97	50	50	50	50	50	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Pengembangan Layanan Rujukan

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Kabupaten / Kecamatan / Desa	10	5	5	5	5	5	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan		Kabupaten/ Kota	Tingkat Kabupaten/Kota
			Jumlah pojok baca digital area publik di Kabupaten /Kecamatan/Desa	Pojok baca digital	0	1	1	1	1	1	Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Insklusi Sosial
													Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
3	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan Penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan - Desa	- -	- -	39 351	39 351	39 351	39 351	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelatihan bagi forum sebagai Anak Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak Anggota forum Anak sebagai 2P	- Forum Anak Kabupaten - Forum Anak Kecamatan - Forum Anak Desa	40 - -	40 - -	40 1.560 -	40 1.560 240	40 1.560 44.000	40 1.560 48.000				
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak	-	1	2	3	3	3				
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	- Kabupaten - Kecamatan - Desa	- - -	- - -	39 351	39 351	39 351	39 351				
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF													
1	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase 9erempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	72	23	72	-	-	-	Kemenag	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Kecamatan /Desa yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	Kecamatan - Desa	39	39	39	-	-	-				
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah Keluarga yang Menerima Bimbingan dan Layanan Pusaka Sakinah	Pasangan	72	23	72	-	-	-				
2	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	39	39	39	39	39	39	DinsosPPKBPPPA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	1	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sember Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	75.82	76.00	78.00	80.00	80.00	80.00	DinsosPPKBPPPA	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)
		Penyediaan layanan pendidikan yang	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	orang	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	orang	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
		Fasilitasi program ketahanan keluarga anti narkoba	Jumlah Kecamatan/Desa yang melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba	- Kecamatan - Desa	-6 -	-5 -	-7 -	-7 -	-7 -	-7 -	Bakesbangpol			
3	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integrative	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	7,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
4	Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	42	42	42	42	42	42	DinsosPPKBPPPA			
		Pelaksanaan standardisasi daycare ramah Anak	Jumlah daycare ramah Anak	Lembaga	2	2	2	2	2	2	Disdikbud			
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	1	1	3	3	3	3	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		santri/santriwati			10	10	10	10	10	10	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	1	1	3	3	3	3	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	
					10	10	10	10	10	10	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	0	0	2	2	2	2	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	
					10	10	10	10	10	10	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN													
1	Persalinan Di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	%	99,1	100	100	100	100	100	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Persentase kunjungan Neonatal	%	100	100	100	100	100	100				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Skrining deteksi	Cakupan ibu hamil diskroning HIV dan Sifilis	%	100	100	100	100	100	100				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
						2025	2026	2027	2028	2029						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	100	100	100	100	100	100				Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
2	Status Gizi Balita	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	98,22	100	100	100	100	100				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
														Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
3	Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	79,9	80	82,5	85	87,5	90	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
4	Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	82,38	80,38	83,18	83,91	84,58	85,6				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
			Persentase rumah sakit terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100				Pengelolaan Surveilans dan Imunisasi	
		Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	100	100	100	100	100	100	100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
		Peningkatan kesehatan Anak Usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan		-	-	-	-	-	-				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	%	97,3	100	100	100	100	100	100				
				Persentase Mengonsumsi Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri Disekolah	%	90	95	95	95	95	95	95	95			
		Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas	40	40	40	40	40	40	40				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di Puskesmas	Puskesmas	40	40	40	40	40	40				
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang	40	40	40	40	40	40	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten Tasikmalaya Sehat	Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%	NA	2,5	1,8	1,2	0,6	0	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
			Presentase sarana produksi pangan indrusti rumah tangga diperiksa yang memenuhi syarat	%	35	20	30	40	52,5	65				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
						2025	2026	2027	2028	2029					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Persentase Desa dengan 75% Kepala Keluarga mengelola air minum dan pangan yang memenuhi syarat	Desa	NA	72	92	119	153	187					
6	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok, dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok	Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	40	40	1.560	1.560	1.560	1.560	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA														
1	Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	77,52	80,49	83,46	86,43	89,4	92,37	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			Angka Partisipasi sekolah (APK) SD/Mi/SDLB/ dan SMP/MTs/SMP LB/ sederajat 7-15 tahun	%	97,65	97,93	98,2	98,47	98,74	99,01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
			Angka Partisipasi sekolah (APK) SD/Mi/SDLB/ dan SMP/MTs/SMP LB/	%	19,33	23,43	27,53	31,63	35,73	39,83				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi SRA	Dokumen	1	1	1	1	1		DinsosPPKBPPPA		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Difasilitasi Tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan (Pelatihan KHA dan SRA)	Satuan Pendidikan PAUD.TK. RA/sD/Mr /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB	100	100	100	100	100	100	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					1	1	1	1	1	1	Kemenag	Program Pendidikan Islam	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	
			Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	100	100	100	100	100	100	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Anak	40	40	40	40	40	40	DinsosPPKBPPPA			
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
1	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													memerlukan Korordinasi	
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	Perangkat Daerah	5	5	5	5	5	5	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Jumlah Kecamatan dan Desa yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	- Kecamatan - Desa	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	DinsosPPKBPPPA			
			Jumlah Desa yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa	351	351	351	351	351	351	DinsosPPKBPPPA			
			Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang Memadai untuk Layanan Anak Korban kekerasan dan penelantaran	Orang	8	10	10	10	10	10	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Koordinasi Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah Kecamatan dan Desa yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	- Kecamatan - Desa	1 -	1 -	39 100	39 200	39 250	39 351	DinsosPPKBPPPA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Jumlah Forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan Khusus	Forum Anak	1	2	3	3	3	3	DinsosPPKBPPPA			
		Pelatihan bagi lembaga layanan	Lembaga layanan Korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	0	10	10	20	30	50	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penanganan Anak korban kekerasan	Standar Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi	Daerah	0	10	10	20	30	50	DinsosPPKBPPPA		Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi	Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Jumlah sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	SDM	3	3	4	5	6	7	DinsosPPKBPPPA			
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan Dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	5	5	5	5	5	5	DinsosPPKBPPPA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Anak Yang Dibebaskan Dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	0	0	0	0	0	0	DPMPTSPTK	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	0	0	0	0	0	0	DPMPTSPTK			
		Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah Perusahaan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Perusahaan	0	0	2	3	4	5	DPMPTSPTK			
		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	0	0	0	0	0	0	DPMPTSPTK			
		Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	0	0	2	3	4	5	DPMPTSPTK			
			Jumlah perusahaan yang menerapkan Pemenuhan Hak Anak	Perusahaan	0	0	2	3	4	5	DPMPTSPTK			

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
						2025	2026	2027	2028	2029					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3	Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	283	592	0	0	0	0	0	DinsosPPKBPPPA	Program Penanganan Bencana Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Makanan - Penyediaan Sandang
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak Korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	147	442	0	0	0	0	0	DinsosPPKBPPPA			Pelayanan Dukungan Psikososial
4	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah Kecamatan dan Desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	- Kecamatan - Desa	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	DinsosPPKBPPPA	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	2	2	2	2	2	2	2				DinsosPPKBPPPA
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak Penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	5	5	5	5	5	5	5				DinsosPPKBPPPA
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan	Lembaga	2	2	2	2	2	2	2				DinsosPPKBPPPA

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus											Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			Jumlah Kecamatan dan Desa yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	- Kecamatan - Desa	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
5	Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah Kecamatan dan Desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	- Kecamatan - Desa	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	39 351	DinsosPPKBPPPA	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	1	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media	5	5	5	5	5	5	DinsosPPKBPPPA	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang Memadai	LPKA	0	0	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA		Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Fasilitasi bagi ABH	Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	0.0000 1	0.000 005	0%	0%	0%	0%	DinsosPPKBPPPA	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
		Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH	Lembaga	1	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kegiatan	0	1	0	1	2	2	DinsosPPKBPPPA	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Korordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Peningkatan kapasitas APH	APH	0	100%	100%	80%	90%	100%	DinsosPPKBPPPA			
7	Pelayanan bagi Anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringdisdikan terorisme	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Bakesbangpol	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	INDIKATOR KLA	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	Desa Layak Anak	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Desa Layak Anak	Jumlah Desa Layak Anak	Desa	1	1	1	1	1	1	DinsosPPKBPPPA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
9	Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	39	39	39	39	39	39	DinsosPPKBPPPA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
					39	39	39	39	39	39	DPMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/m Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN